

## PENINGKATAN PEMAHAMAN TATA KELOLA BLUD PUSKESMAS PANDAN

Yuki Firmanto, Nurlita Novianti  
Universitas Brawijaya  
[yukifirmanto@ub.ac.id](mailto:yukifirmanto@ub.ac.id), [nurlita@ub.ac.id](mailto:nurlita@ub.ac.id)

### Abstract

*In accordance with Permendagri Number 79 of 2018, Pandan Health Center as a BLUD must implement a flexible financial management pattern based on Government Accounting Standards which is marked by the presentation of annual financial reports. Business and Budget Plans (RBA) and Standard Operating Procedures (SOPs) need to be prepared and presented economically, transparently and effectively in order to support the achievement of local government goals. The method of implementing community service uses the service learning method which has four stages, namely investigation, preparation, action and reflection. The results of the service show that the assistance in the preparation of the RBA shows good performance accompanied by the successful preparation of the opening balance of financial statements for 2022 and accounting policies together with the management of the BLUD. Details of the design of the Shopping SOP and Pharmacy SOP are also made and implemented taking into account the characteristics and business schemes of BLUDs in accordance with generally accepted regulations. In its implementation, the Pandan Health Center's finances are expected to be able to understand and interpret financial statement analysis so that the objectives of the financial statements can be achieved more optimally.*

*Keywords: Community Service, Health Center, BLUD, Permendagri Number 79 of 2018*

### Abstrak

*Sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Puskesmas Pandan selaku BLUD mesti menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah yang ditandai dengan adanya penyajian laporan keuangan tahunan. Rencana Anggaran Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) perlu disusun dan disajikan secara ekonomis, transparan dan efektif demi menunjang pencapaian tujuan pemerintah daerah. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat menggunakan metode service learning yang terdapat empat tahapan yaitu investigasi, persiapan, tindakan dan refleksi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan penyusunan RBA menunjukkan kinerja yang baik disertai dengan berhasil dibuatnya saldo awal laporan keuangan tahun 2022 dan kebijakan akuntansi bersama-sama dengan manajemen BLUD. Rincian desain SOP Belanja dan SOP Farmasi juga dibuat dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan karakteristik dan skema bisnis BLUD sesuai dengan peraturan yang berlaku umum. Dalam pelaksanaannya, pihak keuangan Puskesmas Pandan diharapkan untuk mampu memahami dan menginterpretasikan analisis laporan keuangan supaya tujuan laporan keuangan dapat dicapai lebih optimal.*

*Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, Puskesmas, BLUD, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018*

### 1. PENDAHULUAN (Introduction)

Puskesmas Pandan di Kabupaten Mojokerto adalah Puskesmas yang baru saja mengimplementasikan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Pola pengelolaan BLUD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 adalah pola pengelolaan yang memberikan fleksibilitas yaitu keleluasaan dalam menjalankan praktik bisnis yang sehat. BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah.

Fleksibilitas pada pelaksanaannya perlu membuat Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagai dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan untuk bahan

penyusunan rencana kerja dan anggaran. Berdasarkan Permendagri 78 tahun 2018, RBA disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja, standar satuan harga, kebutuhan belanja, dan kemampuan belanja. Puskesmas juga membutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam melakukan operasional puskesmas yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan puskesmas. Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan menyelesaikan suatu pekerjaan dalam memperoleh hasil kerja yang efektif dan efisien.

Sebelum disusunnya SOP maka perlu adanya pemetaan SOP untuk mengidentifikasi keadaan nyata Puskesmas Pandan. Sehingga akan tersusun SOP yang optimal sesuai kondisi puskesmas. SOP yang berkualitas dapat mengatur terkait proses pekerjaan, jabatan yang mengerjakan, jabatan yang memberikan persetujuan, waktu, dokumen, dan kelengkapan lainnya. Dengan dibuatnya sistem manual standar atau (SOP) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja puskesmas. Selanjutnya puskesmas juga diwajibkan melakukan laporan keuangan berdasarkan Kebijakan Akuntansi yang tertera pada Standar Akuntansi Pemerintah dengan penyajian laporan keuangan tiap akhir tahun.

Berdasarkan paparan diatas, maka puskesmas perlu mendapatkan pendampingan persiapan operasional pola keuangan BLUD puskesmas, pendampingan penyusunan Kebijakan Akuntansi, dan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Pandan yang bertujuan terbentuknya pola keuangan BLUD yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **2. TINJAUAN LITERATUR (*Literature Review*)**

### **Pengertian PPK-BLUD**

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK BLUD) merupakan pola pengelolaan keuangan yang dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dengan diberikannya keistimewaan berupa fleksibilitas dalam hal pengelolaan keuangan. Fleksibilitas memberikan kelonggaran untuk dapat mempraktikkan praktek bisnis yang sehat tanpa mencari keuntungan yang bertujuan untuk menambah layanan pada masyarakat dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa (Permendagri Nomor 79, 2018:3).

### **Pengelolaan Pendapatan**

Pendapatan merupakan keseluruhan penerimaan baik dalam bentuk kas maupun tagihan BLUD yang tidak perlu dibayar kembali serta dapat memajukan ekuitas dana lancar dalam rentang waktu tertentu (Permendagri Nomor 61, 2007:3). Sumber-sumber pendapatan BLUD adalah sebagai berikut :

Jasa layanan yang didapatkan dari masyarakat akibat layanan yang disediakan

1. Hibah, baik itu hibah terikat maupun hibah tidak terikat
2. Hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain
3. APBD berbentuk pendapatan yang diperoleh dari DPA APBD
4. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah

Pengelolaan pendapatan boleh dikendalikan secara keseluruhan demi mendanai seluruh pengeluaran BLUD yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang sudah dibuat sebelumnya. Pengecualian yaitu pada pengelolaan pendapatan yang bersumber dari hibah terikat dimana pelaksanaannya harus melalui Rekening Kas BLUD. Rekening Kas BLUD merupakan rekening tempat untuk menyimpan uang BLUD serta memuat semua perolehan pendapatan maupun pembayaran pengeluaran BLUD yang pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin BLUD pada bank umum (Permendagri Nomor 61, 2007:3). Pemanfaatan pendapatan BLUD yang diterima dalam Rekening Kas BLUD dapat dijalankan serta digunakan seutuhnya demi meningkatkan mutu serta kapasitas kuantitas pelayanan yang diberikan kepada publik.

### **Pengelolaan Belanja**

BLUD memiliki keleluasaan dalam hal pengelolaan belanja berupa fleksibilitas belanja melalui peninjauan volume aktivitas pelayanan dengan penyesuaian terhadap transisi penerimaan yang sebelumnya telah ditetapkan secara definitif sebagaimana tercantum dalam ambang batas RBA dan DPA. Keleluasaan belanja BLUD yang dimaksud hanya dapat dilakukan pada pendapatan BLUD yang telah ditetapkan dalam pasal 51 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dimana meliputi jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain serta hibah tidak terikat. Fleksibilitas belanja dapat dilakukan pada belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan APBD,

Ambang batas yakni besaran presentase realisasi biaya yang diperoleh melebihi dari budget yang telah disusun pada RBA dan DPA yang mana sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari kepala daerah terlebih dahulu. Perhitungan besaran ambang batas dilakukan tanpa memperhatikan saldo awal kas tetapi memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional yang terdiri dari hal-hal berikut:

- a. Kecenderungan/tren selisih antara realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dengan anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan
- b. Kecenderungan.tren selisih antara prognosis tahun anggaran berjalan dengan pendapatan BLUD selain APBD.

Pencantuman besaran ambang batas dilakukan di dalam RBA dan DPA. Informasi yang diberikan dalam pencantuman besaran ambang batas tersebut berupa besaran presentase ambang batas. Besaran presentase ambang batas didefinisikan sebagai setiap kebutuhan yang mampu diraih, diprediksi, terukur, rasional serta dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pelaporan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban**

BLUD menyusun laporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah. BLUD dapat mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Daerah. Laporan keuangan BLUD diintegrasikan ke dalam laporan keuangan SKPD untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

## **Pengelolaan, Pengadaan Barang dan Kerjasama**

Berdasarkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, secara umum pengadaan barang dan jasa yang dilakukan BLUD tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku. Namun, BLUD dapat melakukan pengadaan barang di luar yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut jika terdapat alasan efektivitas dan efisiensi. Fleksibilitas hanya berlaku ketika sumber dana berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Dalam mengelola barang dan inventaris, BLUD dapat mengalihkan dan menghapuskan pada pihak lain dengan alasan ekonomis. Pengalihan inventaris dapat dilakukan dengan cara dijual, hibah, atau ditukar ketika inventaris lebih dirasa menguntungkan dibandingkan dengan tetap menjadi investasi daerah. Barang yang dihapuskan atau dialihkan haruslah barang habis pakai dan barang lain yang tidak memenuhi syarat sebagai aset tetap.

## **Rencana Bisnis dan Anggaran**

Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu Satker BLU. Rencana bisnis dan anggaran definitif adalah Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan telah disahkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan. Dokumen RBA disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pencapaian anggaran.

Anggaran merupakan sebuah proyeksi, yaitu perkiraan kemampuan yang sekiranya dapat dicapai dimasa yang akan mendatang. Untuk membuat proyeksi yang realistis sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pencapaian di tahun berjalan, sehingga perumusan proyeksi akan lebih akurat dan reliable.

Menurut Peraturan dalam Negeri (Permendagri) No 79 tahun 2018 Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Daerah yang menerapkan BLUD wajib menyusun RBA yang mengacu pada Rencana Strategis. BLUD harus menyusun Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang nantinya akan dikonsolidasikan menjadi RBA. RBA digunakan menjadi bahan evaluasi yang baik bagi BLU/BLUD karena dalam RBA memuat target kinerja yang akan di capai, dalam target kinerja tersebut dapat menjadi dasar evaluasi dalam tahun berjalan apakah target kinerja dan tujuan BLU/BLUD telah tercapai atau harus di lakukan perbaikan lagi dalam mencapai target kinerja tersebut.

## **Format Penyusunan RBA**

Format penyusunan RBA yang telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018. Penyusunan RBA BLU/BLUD harus disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Dalam bab pendahuluan ini memuat antara lain:
  - a. Gambaran Umum

- b. Visi dan Misi
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Susunan pejabat pengelola dan dewan pengawas BLU/BLUD
- e. Kinerja BLU/BLUD tahun berjalan

Dalam bab kinerja BLU/BLUD tahun berjalan memuat antara lain:

- a. Kondisi lingkungan yang mempengaruhi pencapaian kinerja
- b. Perbandingan antara asumsi dan realisasi rencana bisnis dan anggaran serta dampak terhadap pencapaian kinerja
- c. Pencapaian kinerja per unit
- d. Pencapaian program investasi
- e. Hal-hal lain yang perlu dijelaskan terkait dengan pencapaian kinerja BLU/BLUD
- f. Rencana bisnis dan anggaran BLU/BLUD tahun anggaran

Dalam bab rencana bisnis dan anggaran BLU/BLUD tahun anggaran memuat antara lain:

- a. Kondisi lingkungan BLU/BLUD yang mempengaruhi
- b. Asumsi yang digunakan
- c. Target kinerja dan kegiatan
- d. Program kerja dan kegiatan
- e. Perkiraan biaya
- f. Perkiraan harga
- g. Rencana pendapatan dan biaya operasional per unit
- h. Anggaran BLU/BLUD
- i. Ambang batas rencana bisnis dan anggaran
- j. Proyeksi keuangan tahun anggaran

Dalam bab penutup memuat antara lain:

- a. Kesimpulan
- b. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLU/BLUD

Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan dan sumber pendapatan, dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai dengan format RKA-K/L dan format DIPA BLU.

Pendapatan BLU merupakan pendapatan yang diperkirakan akan diterima yang terdiri dari :

- a. Pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat
- b. Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. Hasil kerja sama blu dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
- d. Penerimaan lainnya yang sah; dan/atau
- e. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN.

Belanja BLU yang dicantukan kedalam ikhtisar RBA dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

1. Belanja Pegawai merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBN (Rupiah Murni), sedangkan belanja pegawai yang didanai dari PNPB BLU dimasukkan ke dalam Belanja Barang BLU
2. Belanja Barang merupakan Belanja Barang yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) dan Belanja Barang yang didanai dari PNPB BLU yang terdiri dari terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya yang berasal dari PNPB BLU, termasuk Belanja Pengembangan SDM.
3. Belanja Modal merupakan Belanja Modal yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) dan Belanja Modal BLU yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya.
4. Penerimaan pembiayaan BLU merupakan penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan/atau penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang BLU. Sedangkan pengeluaran pembiayaan BLU merupakan pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, dan/atau pemberian pinjaman.

### **3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)**

Metode pelaksanaan pengabdian ini adalah *service learning*. *Service learning* adalah metode pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan kegiatan akademisi pada pemberdayaan masyarakat pada akhirnya memberikan kesempatan mahasiswa melakukan refleksi tentang apa yang sudah diimplementasikan (Bawole dan Oentoro, 2019). Untuk tahapan dalam metode *service learning* diadopsi dari penjelasan Kaye (2004) terdiri dari empat tahap yaitu investigasi, persiapan, tindakan, dan refleksi.

#### **Lokasi Kegiatan**

Lokasi kegiatan ini adalah di Puskesmas Pandan, salah satu Puskesmas BLUD di Kabupaten Mojokerto.

Berikut tahap pelaksanaan pengabdian masyarakat Menggunakan Metode *Service Learning*:

- 1) Tahap investigasi yaitu penyelidikan masalah yang dihadapi Puskesmas Pandan dalam penerapan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk investigasi dilakukan secara daring maupun luring. Pada awal investigasi dilakukan secara daring dan membahas terkait garis besar permasalahan atau kendala yang dihadapi puskesmas dalam pelaksanaan tata kelola BLUD. Tahap kedua menyelidiki terkait alur pelaksanaan BLUD dan laporan BLUD apa saja yang belum dibuat oleh Puskesmas Pandan.
- 2) Tahap persiapan adalah mempersiapkan mahasiswa pengabdian masyarakat baik dalam hal mental maupun pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi pada lapangan. Mahasiswa diberikan pengetahuan lebih terkait tata kelola BLUD. Selain itu pada tahap ini tim pengabdian masyarakat bersama kepala puskesmas dan tim keuangan puskesmas menyepakati terkait solusi kendala pelaksanaan tata kelola BLUD Puskesmas Pandan dan menyusun *rundown* kegiatan pengabdian masyarakat.

- 3) Tahap tindakan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penjelasan tata kelola BLUD oleh dosen pengabdian masyarakat. hal ini perlu dilakukan untuk memperkuat pemahaman sumber daya manusia Puskesmas Pandan terkait tata kelola BLUD. Pada hari pertama, dosen memaparkan terkait tata kelola BLUD. Pada hari kedua, dosen memaparkan materi terkait laporan maupun dokumen yang wajib dimiliki Badan Layanan Umum Daerah. Kedua kegiatan ini dilakukan secara luring di Puskesmas Pandan.
- 4) Tahap refleksi cenderung dilakukan banyak oleh mahasiswa pengabdian masyarakat karena mereka yang terjun langsung untuk melakukan pendampingan kepada mitra. Sebelum diterjunkan ke lapangan mereka sudah dibekali pengetahuan dan bahan yang sudah disusun sebelumnya. Mahasiswa bersama dosen membuat beberapa format dokumen yang akan diajarkan kepada mitra berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. Untuk format dokumen yang telah dibuat adalah dokumen rencana bisnis dan anggaran, mutasi laporan keuangan, dan laporan keuangan 2021 sebagai saldo awal laporan keuangan 2022. Berikut adalah kegiatan pada tahapan ini:
  - a) Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran 2022  
Dalam tahap ini, pendamping dan bagian keuangan Puskesmas Pandan bersama-sama melakukan penyusunan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran sebagai dasar mereka dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Penyusunan RBA berpedoman pada Rencana Strategis Puskesmas Pandan dan realisasi pendapatan maupun belanja Puskesmas di tahun sebelumnya.
  - b) Pemetaan Proses Bisnis : Mekanisme Belanja  
Peralihan Tata Kelola Keuangan menjadi BLUD menyebabkan proses bisnis dalam pelaksanaan fungsi Puskesmas Pandan juga mengalami perubahan. Untuk dapat mengembangkan proses bisnis yang optimal, pendamping perlu melakukan pemetaan terhadap proses saat ini, sebelum dapat disusun sebuah desain proses bisnis yang lebih efektif dan efisien. Dalam tahap ini, pendamping melakukan pemetaan atas mekanisme belanja, salah satu proses vital dalam pelaksanaan operasional.
  - c) Pemetaan Proses Bisnis : Penatausahaan Farmasi  
Puskesmas Pandan merupakan instansi yang bergerak dalam bidang kesehatan. Salah satu pos penting dalam penatausahaan keuangan Puskesmas Pandan adalah pos persediaan farmasi. Sebagai pemenuhan kewajiban BLUD dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat, perlu di cermati penatausahaan farmasi mulai dari mekanisme penerimaan, pengeluaran, hingga pengakuan nilai persediaan farmasi. Dalam tahap ini, pendamping dan petugas farmasi akan melakukan pemetaan proses bisnis bagian farmasi sebelum dapat disusun desain pengembangan alur bisnis yang lebih optimal.
  - d) Pendampingan Penyusunan Saldo Awal Laporan Keuangan  
Puskesmas Pandan sebagai instansi yang menerapkan pola tata kelola keuangan BLUD memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan mereka dalam satu periode terakhir. Sebagai acuan penyusunan laporan keuangan tahun pertama,

pendamping dan bagian keuangan menyusun saldo awal laporan keuangan. Disusunnya saldo awal ini ditujukan agar laporan keuangan Puskesmas Pandan dapat dibandingkan, sehingga laporan keuangan Puskesmas Pandan lebih andal.

e) Diskusi Kebijakan Akuntansi Puskesmas Pandan

Untuk mendukung keandalan laporan keuangan Puskesmas Pandan, dibutuhkan pedoman penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada SAP 13. Dalam tahap ini, pendamping dan bagian keuangan Puskesmas Pandan melakukan diskusi mengenai kebijakan akuntansi yang akan disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Keuangan BLUD, yaitu SAP 13 serta sesuai dengan pelaksanaan kegiatan operasional yang biasa dilakukan oleh Puskesmas Pandan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN (*Results and Discussion*)**

##### **i. Tahap Investigasi**

Pada tahapan ini didapatkan permasalahan utama dalam pelaksanaan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Pandan. Pertama, belum memahami secara penuh dasar-dasar Badan Layanan Umum Daerah dan belum memahami pelaksanaan BLUD khususnya pada lingkup kerja puskesmas. Kedua, belum mengetahui aspek mana yang perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu dalam mengimplementasikan BLUD. Ketiga, belum mengetahui dokumen dasar yang perlu dibuat oleh puskesmas yang sudah berbentuk BLUD.

##### **ii. Tahap Persiapan**

Tahapan ini diawali dengan kegiatan diskusi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat terkait solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi Puskesmas Pandan dalam mengimplementasikan tata kelola BLUD. selanjutnya hasil diskusi tersebut disampaikan kepada mitra dan mitra menyepakati beberapa solusi berikut untuk menjadi bahan pengabdian masyarakat:

- ✓ Perlu adanya pemaparan dasar terkait tata kelola BLUD
- ✓ Perlu adanya perbaikan alur kegiatan utama Puskesmas Pandan
- ✓ Perlu adanya pendampingan penyusunan dokumen yang harus dimiliki BLUD yaitu Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Laporan keuangan BLUD

Langkah kedua yaitu mahasiswa pengabdian dibelaki pengetahuan terkait tata kelola BLUD, kegiatan utama Puskesmas Pandan, Peraturan BLUD, dan dokumen dokumen BLUD. Langkah ketiga, tim pengabdian menyusun format flowchart yang berguna dalam perbaikan SOP kegiatan utama puskesmas, dokumen RBA, dan mutasi laporan keuangan serta laporan keuangan. Langkah terakhir pada tahap ini membuat rundown acara kegiatan pengabdian masyarakat.

##### **iii. Tahap Tindakan**

Tahap tindakan mengenai peningkatan pemahaman dasar mitra terkait BLUD. Pada hari pertama dosen pengabdian memaparkan materi dasar tata kelola BLUD. Pada hari kedua dosen pengabdian memaparkan materi dokumen-dokumen yang harus dimiliki institusi BLUD. Pada hari ketiga dosen pengabdian menjelaskan dasar-dasar akuntansi yang berguna dalam penyusunan laporan keuangan BLUD. kegiatan ini dilakukan secara luring dan berlangsung di

Puskesmas Pandan. Pada sesi terakhir sebarikan *post test* dalam bentuk *g form* sebagai bahan evaluasi dan mengetahui seberapa besar pemahaman mitra terhadap materi yang telah dipaparkan. Hasil dari *post test* terdapat rata-rata pemahaman mitra terhadap materi adalah 80%.

#### **iv. Tahap Refleksi**

Tahap terakhir pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pelatihan dan pendampingan langsung yang dilakukan mahasiswa kepada mitra. Kegiatan ini berlangsung selama lima bulan. Berikut adalah urutan pendampingan yang dilakukan pengabdian masyarakat ini:

##### **1) Pendampingan Penyusunan RBA 2022**

Kinerja tim RBA Puskesmas Pandan dalam tahap penyusunan RBA 2022 cukup baik karena yang bertanggungjawab terkait penyusunan RBA paham dan selalu mengingatkan kepada pihak yang datanya dibutuhkan di RBA 2022 untuk segera menyelesaikan. Penyusunan RBA 2022 diawali dengan cara penyesuaian data yang ada pada bab satu berisi terkait gambaran umum, sejarah puskesmas, visi dan misi, karakteristik usaha, struktur organisasi puskesmas serta maksud dan tujuan dibuatnya RAB 2022.

Selanjutnya penyusunan RBA 2022 terkait bab dua untuk data yang berhubungan dengan BLUD dan BOP baik dalam hal belanja maupun pendapatan sudah ada terkait bahannya sehingga dalam hal mengolah data tersebut cukup cepat. Untuk data BLUD sudah bisa didapatkan dari aplikasi SIK baik pendapatan maupun belanja. Sedangkan untuk data BOP masih dalam bentuk excel karena bendahara BOP belum memasukkan data penyerapan non BLUD di SIK. Namun tetap saja ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mengisi pembahasan kinerja Puskesmas Pandan tahun 2021. Pertama, untuk realisasi belanja BOK dari bulan januari sampai september cukup sulit karena bagian BOK masih fokus mengerjakan SPJ yang sudah mendekati *deadline* pengumpulan. Hal ini sebenarnya bukan sepenuhnya salah sepenuhnya dari bagian BOK Puskesmas, kejadian ini adalah akibat dari keterlambatan dinas kesehatan dalam mengumumkan DPA PAK BOK 2021.

Capaian kinerja non keuangan pada bab dua ini juga mengalami kendala karena tim yang bertanggungjawab dalam hal SPM masih disibukkan dengan vaksinasi dan juga yang mengisi terkait blangko yang dibuat tim SPM ada beberapa yang belum terisi. Selain itu salah satu anggota Tim SPM masih membantu bagian BOK untuk mengerjakan SPJ. Sehingga tim SPM membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengumpulkan dan menganalisis data SPM.

Terkait rencana bisnis dan anggaran 2022 terkait rencana pendapatan dan belanja yang berhubungan dengan BLUD dan BOP sudah cukup cepat dalam hal mengumpulkan datanya. Namun ada beberapa kendala juga dalam menyusun bab ketiga ini. Pertama, data terkait sasaran dan target kinerja BLUD belum ada karena tim SPM disibukkan dengan vaksinasi dan masih memproses data yang dibutuhkan di bab dua dan pada waktu yang bersamaan salah satu anggota im SPM masih disibukkan dengan pengerjaan tugas lainnya. Kedua, belum diketahuinya pagu anggaran belanja BOK karena dinas kesehatan belum mengumumkan DPA BOK pada tahun 2022. Sehingga bagian BOK belum bisa menyusun maupun menganalisis apa saja yang akan mereka belanjakan pada tahun 2022.



## 2) Pendampingan Pengembangan Proses Bisnis

Sesuai tujuan BLUD yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang lebih efektif dan efisien, hal yang vital untuk dijadikan perhatian salah satunya adalah proses bisnis dari instansi yang melaksanakan kegiatan. Dari proses bisnis yang optimal, semakin tinggi keberhasilan instansi dalam mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Puskesmas Pandan adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang merupakan instansi pemerintahan yang menjalankan urusan pemerintah di bidang kesehatan, sangat erat dengan urusan mengenai farmasi. Pengembangan penatausahaan persediaan farmasi diharapkan mampu memperbaiki efektifitas dan efisiensi operasional pelayanan. Selain itu, kegiatan pengadaan atau belanja ketika menjadi BLUD lebih fleksibel dan sepenuhnya berada di manajemen Puskesmas Pandan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sebuah mekanisme yang dapat mendorong terciptanya aktivitas belanja yang efektif dan efisien.

### a. Pemetaan Proses Bisnis Belanja

Puskesmas Pandan dalam memetakan proses bisnis belanja dilakukan secara bersama antara Bendahara Kapitasi, Bendahara BOP, dan Bendahara BOK. Setelah dikumpulkan dan dianalisis bahwa proses bisnis belanja BOP dan BOK yang sumber dananya sama-sama berasal dari APBD memiliki alur yang sama. Terdapat beberapa macam alur belanja pada puskesmas yakni belanja tunai kapitasi, belanja non tunai kapitasi, belanja APBD panjar, dan belanja APBD LS.



b. Desain SOP Belanja

Untuk memfasilitasi fleksibilitas belanja atas pola tata kelola BLUD di Puskesmas Pandan, disusunlah SOP Belanja yakni uang pengajuan persediaan, belanja LS, pergeseran kas tunai, belanja tunai, pengembalian sisa SPJ.



c. Pemetaan Proses Bisnis Farmasi

Puskesmas Pandan dalam memetakan proses bisnis belanja dilakukan secara bersama dengan tim farmasi. Alur farmasi yang terjadi pada puskesmas selama ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, distribusi, pemusnahan obat, dan stok opname.

d. Desain SOP Farmasi

Berdasarkan hasil pemetaan proses bisnis farmasi ada beberapa penambahan alur ada proses bisnis farmasi yaitu perencanaan, pengadaan, pengadaan melalui dinas kesehatan, penerimaan, penerimaan melalui dinas kesehatan, distribusi kepada unit layanan, distribusi kepada pasien, pengembalian obat unit ke gudang farmasi, pengembalian obat dari puskesmas ke dinas kesehatan, pemusnahan obat, dan stok opname. Pada SOP pengadaan ada perbaikan alur yaitu saat pembelian obat harus melalui e-catalog. Ada penambahan baru terkait alur pengembalian obat kedaluwarsa baik unit ke gudang farmasi puskesmas maupun dari gudang puskesmas ke gudang dinas kesehatan. Berikut adalah salah satu bentuk *flowchart* Standar Operasional Prosedur penerimaan obat, reagen, dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) dari Dinas Kesehatan.

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Penyedia	Farmasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mulai						
2	Penyedia mengirimkan barang ke Puskesmas.			Surat jalan, SBBK, dan Faktur			
3	Farmasi menerima barang.			Surat jalan, SBBK, dan Faktur	1 Jam		
4	Farmasi memeriksa barang.			Surat jalan, SBBK, dan Faktur	1 Jam		
5	Farmasi menandatangani dokumen.			Surat jalan, SBBK, dan Faktur	20 Menit		
6	Farmasi menyimpan barang ke dalam gudang di tata sesuai dengan abjad dan sistem FEFO (First Expired First Out)				2-3 Hari		
7	Farmasi mencatat barang masuk ke dalam LPLPO dan kartu stok.				1-2 Hari	LPLPO	
8	Selesai						

e. Implementasi SOP Belanja dan Farmasi

Pendampingan implementasi SOP Belanja pada Puskesmas Pandan dilaksanakan setiap kali pendampingan baik pendampingan secara luring maupun daring. Pendampingan implementasi SOP belanja dan farmasi dilaksanakan setelah dibuatnya pemetaan SOP belanja dan farmasi. Untuk tahap pertama yaitu pendampingan SOP Belanja dihadiri oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Verifikator, dan tim pendukung pelaksanaan BLUD lainnya. Beberapa kali saat pendampingan bendahara pengeluaran masih menanyakan terkait penginputan SPP GU, SPM dan pencairan di SIK. Hal ini terjadi dikarenakan pengisian hal tersebut biasanya dilakukan satu kali dalam satu bulan.

Pada awal-awal implementasi SOP belanja bendahara pengeluaran masih menghitung secara manual terkait SPP GU. Namun pada bulan September bendahara pengeluaran sudah berpatakan pada aplikasi SIK. Sehingga pekerjaan bendahara pengeluaran sudah optimal.

Pendampingan implementasi SOP farmasi pada Puskesmas Pandan dilaksanakan beberapa kali dengan tim farmasi. Dalam hal ini memberikan masukan juga terkait pelaksanaan maupun pencatatan yang berhubungan dengan farmasi. Pada saat ini sudah cukup baik pencatatan farmasi. Hal ini bisa dilihat bahwa tim farmasi sudah melakukan pencatatan secara berkala.

### 3) Penyusunan Laporan Keuangan

Puskesmas Pandan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan anggarannya berkewajiban untuk melaksanakan pelaporan atas kegiatannya. Laporan tersebut berupa laporan kinerja dan juga laporan keuangan yang disusun sesuai pedoman penyusunan laporan keuangan BLUD, yaitu PSAP 13.

Untuk pembuatan laporan keuangan 2022 perlu membuat saldo awal laporan keuangan. Sehingga pada kegiatan pengabdian ini difokuskan dalam pembuatan saldo awal laporan keuangan 2022 yaitu laporan keuangan tahun 2021. Selain itu, dalam menyusun Laporan Keuangan perlu didasari oleh pedoman yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Kebijakan Akuntansi. Kebijakan Akuntansi akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan sesuai dengan budaya dan kegiatan yang ada di Puskesmas Pandan.

a. Penyusunan Saldo Awal Laporan Keuangan 2022

Penyusunan Saldo Awal Laporan Keuangan 2022 Puskesmas Pandan dimulai dengan mengumpulkan data keuangan yang diolah dalam bentuk mutasi laporan keuangan. Mutasi ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu kas, beban, belanja, utang, piutang, persediaan, dan aset. Mutasi ini sangat membantu dalam hal penyusunan laporan keuangan. Untuk setiap bagiannya juga dirinci tiap bulan. Sehingga dapat mempermudah pengecekan bahan dalam penyusunan laporan keuangan. Pada tahap ini juga pendamping menjelaskan secara umum terkait kas, beban, belanja, utang, piutang, persediaan, dan aset karena istilah tersebut sangat asing bagi pengelola keuangan yang ada di Puskesmas Pandan. Berikut tampilan mutasi laporan keuangan sebagai alat dalam penyusunan laporan keuangan

A B C			D E F G H I J K L M N O												
No	Bulan	Saldo awal	Mutasi Masuk												
			Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerjasama	APBD	Pendapatan Entitas Ak	Hibah	Jasa Giro	Bunga	Selisi Nilai tukar	Komis	Investasi	Pengembangan Usaha	
1	Januari	Rp 99.405.533,39	44.560.000,00												
2	Februari	Rp 140.445.082,85	48.179.500,00												
3	Maret	Rp 150.679.292,84	44.660.200,00			53.648.206,00									
4	April	Rp 164.137.915,05	-												
5	Mei	Rp 164.137.915,05	-												
6	Juni	Rp 164.137.915,05	-												
7	Juli	Rp 164.137.915,05	-												
8	Agustus	Rp 164.137.915,05	-												
9	September	Rp 164.137.915,05	-												
10	Oktober	Rp 164.137.915,05	-												
11	November	Rp 164.137.915,05	-												
12	Desember	Rp 164.137.915,05	-												
13															
14			Rp 137.799.700,00			Rp 53.648.206,00			Rp 210.711,66	Rp 210.711,66					
15				Rp 138.010.411,66		Rp53.648.206,00					Rp 138.010.411,66	-Rp 461.963.727,95			
16															
17															
18	TABEL BANTU BELANJA			71740895											
19	TABEL BANTU BELANJA			71740895											
20		Belanja Barang (non farmasi)	Belanja Barang (mamin)	Belanja Barang (farmasi)	Belanja Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Langganan Daya dan Jasa	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Modal	Pegawai	Belanja Barang (non farmasi)	Belanja Barang (mamin)	Belanja Barang (non farmasi)	Belanja Jasa	
21	Januari														
22	Februari														
23	Maret	600.000,00	4.830.000,00		56.679.148,00		5.308.882,00	420000		5.440.000,00	Rp9.302.800,00			Rp8.700.000,00	
24	April														
25	Mei														
26	Juni														
27	Juli														
28	Agustus														
29	September														
30	Oktober														
31	November														
32	Desember														
33		Rp600.000,00	Rp4.830.000,00	Rp0,00	Rp56.679.148,00	Rp0,00	Rp5.308.882,00	Rp420.000,00	Rp0,00	Rp5.440.000,00	Rp9.302.800,00			Rp8.700.000,00	
34															
35		Rp17.710.000,00	Rp17.710.000,00	Rp8.294.350,00	Rp119.513.549,00		Rp27.845.074,00	Rp3.080.000,00	Rp3.200.000,00	Rp21.020.000,00	Rp2.091.032,00			Rp5.400.000,00	
36	TABEL BANTU PENDAPATAN USA														
37	TABEL BANTU PENDAPATAN USA														
38	TABEL BANTU PENDAPATAN USA														

Kendala utama dalam penyusunan saldo awal laporan keuangan adalah aset tetap karena masih belum benar terkait datanya. Sehingga membuat neraca tidak seimbang. Kendala kedua yaitu masih tidak terbiasanya bagian keuangan puskesmas dengan akun-akun dalam laporan keuangan terutama pada akun beban. Kendala ketiga yaitu hanya satu orang yang menyusun laporan keuangan sehingga jika orang tersebut tidak menghadiri pendampingan maka tidak ada kemajuan dalam hal saldo awal laporan keuangan 2022. Kendala ke-empat adalah data yang berasal dari pihak lain tim BLUD tidak terkumpul dengan cepat sehingga menghambat penyusunan laporan keuangan.

#### b. Penyusunan Kebijakan Akuntansi

Pendampingan mengenai penyusunan Kebijakan Akuntansi Puskesmas Pandan dilakukan bersama dengan bagian keuangan Puskesmas termasuk Akuntan. Pendampingan dilakukan per bab dalam setiap pertemuan yang meliputi tujuan laporan keuangan, komponen laporan keuangan, tanggung jawab atas laporan keuangan, kebijakan mengenai LRA, kebijakan mengenai Laporan Perubahan SAL, kebijakan mengenai LO, kebijakan mengenai LPE, kebijakan mengenai neraca, kebijakan mengenai laporan arus kas, kebijakan mengenai catatan atas laporan keuangan, serta analisis laporan keuangan. Selain itu muncul kebijakan akuntansi baru setelah berdiskusi dengan BPKAD bahwa pendapatan jasa giro pada rekening bendahara pengeluaran bisa diakui sebagai pendapatan dari puskesmas.

Dalam pelaksanaannya, baik akuntan maupun bendahara Puskesmas Pandan dapat dengan

baik mengikuti pembahasan mengenai kebijakan akuntansi dikarenakan sebelum pembahasan kebijakan, mereka telah terlebih dahulu praktik dalam menyusun saldo awal laporan keuangan. Hal yang perlu diperhatikan lagi dalam pendampingan mengenai penyusunan laporan keuangan adalah kemampuan puskesmas dalam menginterpretasikan analisis laporan keuangan sehingga tujuan laporan keuangan dapat diwujudkan dengan lebih optimal. Selain itu akuntan puskesmas sekarang sedang mulai mengenyam pendidikan sarjana akuntansi. Sehingga diharapkan kedepannya pengelolaan keuangan di Puskesmas Pandan menjadi lebih baik dan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku.

## 5. KESIMPULAN (*Conclusions*)

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan penyusunan RBA menunjukkan kinerja yang baik disertai dengan berhasil dibuatnya saldo awal laporan keuangan tahun 2022 dan kebijakan akuntansi bersama-sama dengan manajemen BLUD. Rincian desain SOP Belanja dan SOP Farmasi juga dibuat dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan karakteristik dan skema bisnis BLUD sesuai dengan peraturan yang berlaku umum. Saran kedepan untuk Puskesmas adalah pihak keuangan Puskesmas Pandan diharapkan untuk mampu memahami dan menginterpretasikan analisis laporan keuangan supaya tujuan laporan keuangan dapat dicapai lebih optimal.

## 6. DAFTAR PUSTAKA (*References*)

- Bawole, Paulus dan Kristian Oetoro. 2019. *Service Learning* sebagai Alternatif Metode Pembelajaran Mahasiswa dalam Pengabdian kepada Masyarakat Studi Kasus: IFSTS-L Yogyakarta, Halmahera Utara, dan Sumba Tengah. Seminar Nasional Pendidikan Program Studi Pendidikan Fisika FKIP ULM 285-293.
- Kaye, C. B. (2004). *The complete guide to service learning: Proven, practical ways to engage students in civic responsibility, academic curriculum, and social action*. Minneapolis: Free Spirit Publishing.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2016. Pernyataan Nomor 13: Standar Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Jakarta. Diakses dari <http://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2016/02/PSAP-13-PLK-BLUV-Ver-KSAP-final.pdf>, pada 14 Februari 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto
- Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rizal, Moch. 2020. Implementasi Sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) (Studi Kasus pada Puskesmas Sukabumi di Kota

Probolinggo). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.

Ramdhani, Abdullah & Ramdhani, Ali Muhammad. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol 11, No 1, 1-12.

Waluyo, Budi. 2014. Analisis Permasalahan pada Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. *Jurnal Infoartha*. 32014. 27-38.